

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EMBUNG DI DESA MANGGIHAN KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

**Aliefia Hamidah, Supratiwi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <https://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai masalah infrastruktur yang kurang memadai di Desa Manggihan. Sudah sejak lama masyarakat Desa Manggihan menggunakan cara konvensional untuk mendapatkan air dengan memanfaatkan sumur bor dan air sungai. Cara ini dinilai tidak efisien karena besarnya tenaga yang dibutuhkan dan memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu, diperlukan teknologi tepat guna dan aplikatif untuk mengatur ketersediaan pemenuhan kebutuhan air. Skripsi ini menggali tentang bagaimana pelaksanaan program pembangunan embung di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Proses pembangunan diawali dari proses pengambilan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan menjabarkan segala “fenomena” yang tampak dan memaknai gejala-gejala (*noumena*) dibalikinya. Untuk melihat hal tersebut, peneliti berusaha untuk memahami dan memberikan informasi yang merinci terhadap suatu gejala atau fenomena dengan sangat dalam serta memberikan simpulan terhadap fenomena tersebut sesuai dengan konteksnya dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan embung di Desa Manggihan dapat meningkatkan kemudahan untuk mendapatkan air dan memberikan infrastruktur yang memadai untuk tampungan air, irigasi pertanian, kebutuhan peternakan, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam proses implementasi kebijakan, pemerintah sebagai implementor seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam alokasi dana kejelasan dalam Standar Operasional Prosedur. Akan tetapi, secara keseluruhan dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi implementasi kebijakan ini telah berhasil dilakukan.

Implementasi kebijakan ini berlandaskan Peraturan Gubernur No. 81 Tahun 2013 yang pertama kali digagas oleh Ganjar Pranowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2015. Pada realitanya, satu-satunya aspek yang dapat meningkatkan perekonomian desa adalah pembangunan infrastruktur. Mereka telah memiliki potensi tetapi belum dapat mengolah dan mengalokasikan potensi tersebut. Pembangunan embung ini memiliki dampak bagi masyarakat, yaitu sebagai tampungan air untuk kebutuhan rumah tangga, peternakan, dan pertanian yang dialirkan menggunakan meteran air. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai inisiasi desa lain dalam menanggulangi problematika serupa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembangunan Embung, Desa Manggihan, Infrastruktur Embung Desa

## ***ABSTRACT***

This research examines the problem of inadequate infrastructure in Manggihan Village. For a long time, the people of Manggihan Village have used conventional methods to obtain water by utilizing boreholes and river water. This method is considered inefficient because of the amount of energy needed and requires a long time. Therefore, appropriate and applicable technology is needed to regulate the availability of water needs fulfillment. This thesis explores the implementation of the reservoir development program in Manggihan Village, Getasan District, Semarang Regency. The development process begins with policy-making, planning, and implementation.

The method used in this research is qualitative with descriptive analysis method by describing all the “phenomena” that appear and interpreting the symptoms (noumena) behind it. To see this, researchers try to understand and provide detailed information on a symptom or phenomenon very deeply and provide conclusions about the phenomenon in accordance with its context by conducting interviews, observations and documentation.

This research uses George Edward III's implementation theory. The results showed that the construction of a reservoir in Manggihan Village can increase the ease of obtaining water and provide adequate infrastructure for water storage, agricultural irrigation, livestock needs, and household needs. In the policy implementation process, the government as the implementor should be more responsive and quick in allocating funds for clarity in the Standard Operating Procedure. However, overall in the aspects of communication, resources, and bureaucratic structure, the implementation of this policy has been successfully carried out.

The implementation of this policy is based on Governor Regulation No. 81 of 2013 which was first initiated by Ganjar Pranowo, who at that time still served as Governor of Central Java in 2015. In reality, the only aspect that can improve the village economy is infrastructure development. They already have the potential but have not been able to cultivate and allocate that potential. The construction of this reservoir has an impact on the community, namely as a water reservoir for household needs, livestock, and agriculture which is channeled using a water meter. This research can also be used as an initiation for other villages to overcome similar problems.

**Keywords:** Policy Implementation, Embung Development, Manggihan Village, Village Embung Infrastructure

## **PENDAHULUAN**

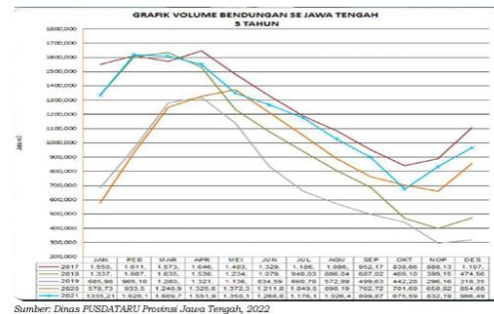
Konsep pembangunan terkhusus di negara Indonesia berkaitan erat dengan pola sistem politik dan administrasi negara yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena administrasi pembangunan merupakan administrasi negara yang memiliki peran sebagai agen perubahan yang bertujuan

mencapai keberhasilan pembangunan di berbagai aspek (Weidner, dkk dalam Ibrahim, 2008:3). Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menyatakan bahwasannya tujuan adanya pembangunan dan perencanaan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakat serta

penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sistem sarana dan prasarana, peningkatan potensi ekonomi lokal, serta pengalokasian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejumlah wilayah terutama di pedesaan Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah dengan banyak desa yang mengalami kekeringan. Sebagai wilayah rawan kekeringan, Kecamatan Getasan telah berupaya melakukan antisipasi dalam menghadapi kemarau panjang.

Menurut data pantauan BMKG pada tahun 2021 tepatnya akhir Agustus, perkembangan musim kemarau tercatat bahwa 85,1% wilayah Indonesia mengalami kemarau panjang. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk ke dalam wilayah HTH (Hari Tanpa Hujan). Tingkat kebutuhan air untuk pengairan rata-rata per tahun sebanyak 19.636.378.014 m<sup>3</sup>/ tahun dengan sumsi perhitungan yang berdasar pada perencanaan kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Untuk mendukung tingkat ketanahan pangan, terdapat aktualisasi pengelolaan jaringan irigasi serta adanya pembangunan penampungan air seperti embung

Wilayah Provinsi Jawa Tengah, memiliki total luas area Daerah Irigasi (DI) sebesar 953.804 ha, yang terbagi atas 33 DI kewenangan pusat dengan total luas mencapai 347.674 ha (36,45 persen), total 108 DI berada pada kewenangan provinsi dengan luas sebesar 86. 865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI yang berada dalam kewenangan Kabupaten/Kota dengan total seluas 519.265 ha (54,44 persen).



Gambar 1. Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.

Sumber : pusdataru.jatengprov.go.id

Menurut data pada gambar di atas menunjukkan bahwa adanya pasokan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir serupa yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret hingga bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai November. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan inovasi agar

ketersediaan air embung dapat terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencukupi pasokan air dan memenuhi ketahanan pangan yaitu melalui program 1000 embung. Kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.81 Tahun 2013 tentang Pembangunan Waduk/Embung/Bendungan. Berkaitan dengan hal ini, wilayah Desa Manggihan mengambil inisiasi cepat dalam upaya memingkatkan infrastuktur desa melalui pembangunan embung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pembuatan embung dalam meningkatkan kualitas infrastuktur air di Desa Manggihan Tahun 2021. Desa Manggihan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Kecamatan Getasan ini berlokasi di Lereng Gunung Merbabu. Desa ini memiliki luas wilayah 260,20 Ha yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Seturun, Sengon, Pendem, dan Manggiharjo yang sebagian besar wilayah terdiri dari lahan pertanian. Berdasarkan pada kondisi objektif di wilayah desa, masih menunjukkan problematika dalam tantangan pelaksanaan pembangunan

Desa Manggihan, terkhusus dalam bidang mata pencaharian utama, yaitu pertanian, meliputi rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas serta belum terkelolanya SDA dan potensi yang ada secara maksimal. Bukan hanya itu, dukungan infrastuktur desa pun masih belum memadai. Hal ini mengakibatkan masih tingginya pengangguran terbuka dikarenakan kualitas pendidikan yang relatif rendah. Berkaitan dengan hal ini, potensi pertanian seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik agar menghindari meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu, infrastuktur irigasi menjadi hal yang paling krusial.

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memenuhi beberapa aspek, diantaranya (1) digunakan untuk menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan secara umum pada pembangunan desa serta dapat dipergunakan untuk penelitian serupa., (2) Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan program embung Manggihan yang dilaksanakan, (3) Sebagai bentuk aspirasi, saran, dan masukan terhadap program pembangunan desa terkait kelemahan serta kelebihan kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edwars III yang memiliki 4 indikator, yaitu indikator komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Yuwanto et. Al (2020) berjudul *Impact Evaluation in Banyumas District, Central Java*. Penelitian ini berusaha mengkaji dampak kebijakan pembangunan embung di Kabupaten Banyumas dengan membandingkan capaian sebelum dan sesudah dilaksanakan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus studi *comparative method*. Hasil penelitian ini diukur dengan data BPS yang berasal dari hasil PDB domestik Bruto. Dampak dari pembangunan Embung di Kabupaten Banyumas dalam bidang pertanian, hanya mampu menaikkan 1% PDRB dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai belum membantu pertumbuhan ekonomi. Perbedaan dari penelitian yang saya lakukan, penelitian ini berusaha mengevaluasi hambatan dan optimalisasi dari kebijakan pembangunan embung yang terfokus pada produktivitas pertanian di Kabupaten Banyumas. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa

dampak adanya program pembangunan embung ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dampak peningkatannya memang cukup besar. Namun pada realitanya hasil presentase lahannya sangat kecil. Persamaan penelitian kami adalah pembahasan mengenai permasalahan air yaitu ketidaksesuaian distribusi air antara kebutuhan dan penyediaan tempat (parsial).

Penelitian dari Ulvia Noer Uyunina (2017) berjudul *Studi Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten Bojonegoro Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Program seribu embung memberikan manfaat kepada masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak lain yang dihasilkan yaitu ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan (meningkatkan produksi panen). Pembangunan seribu embung merupakan salah satu solusi yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, terdapat temuan bahwasannya program pembangunan embung hanyalah sekedar pembangunan secara teknis dan infrastruktur semata yang tidak dibarengi dengan konsepsi yang matang

serta arah kebijakan dalam kedaulatan pangan yang diinginkan oleh Kabupaten Bojonegoro.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menghasilkan data analisis deskriptif berupa narasi ataupun lisan berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini digunakan sebagai sarana memperoleh data penelitian dan sumber-sumber valid yang didapat dari wawancara maupun sumber-sumber yang relevan lain. Penelitian ini berlokasi di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Desa Manggihan merupakan desa yang rawan kekeringan karena belum memiliki jaringan irigasi yang layak. Subjek penelitian yang diambil adalah masyarakat dan kelompok tani untuk memperoleh informasi secara langsung demi kesempurnaan penelitian.

Data yang diambil dari kajian kepustakaan berupa jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan, dokumen ataupun buku-buku yang berguna sebagai pernyataan atau temuan pelengkap dalam penelitian. Penelitian ini meliputi

beberapa prosedur, yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. Prosedur yang dilakukan penulis untuk melakukan triangulasi data dalam penelitian ini meliputi :

1. Melakukan validasi atas sumber-sumber lain melalui dokumen, literatur, ataupun narasumber lain.
2. Melakukan *in-dept interview* kepada narasumber
3. Melakukan uji silang data terhadap data narasumber dan realitas yang ada di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisa Implementasi Kebijakan Tentang Pembangunan Embung Desa Manggihan**

Analisis implementasi kebijakan embung berdasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2013 dan berdasarkan pada teori implementasi George Edwards III yang bertujuan untuk melihat bagaimana pembangunan di Desa Manggihan ini sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan beberapa aspek, seperti aspek lingkungan dan aspek sosial. berdasarkan pada teori George

C.Edwards III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan terdiri atas empat komponen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### a. Komunikasi

Komunikasi ini tentunya menjadi faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan. Implementasi dapat terealisasi dengan maksimal apabila implementor telah mengetahui apa yang akan dia lakukan. Pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan oleh implementor ini dapat berjalan apabila komunikasi yang terjalin juga sangat baik. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat Desa Manggihan telah melakukan upaya komunikasi yang baik yang dimulai saat sosialisasi dan proses evaluasi kebijakan. Sosialisasi dilaksanakan satu kali, yaitu satu tahun sebelum proses pembangunan. Sedangkan evaluasi dilaksanakan setiap 25% persen pembangunan embung. Adapun pihak yang terlibat dalam proses komunikasi yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan, Balai Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, masyarakat, dan konsultan pembangunan. Kelompok Tani Utomo memiliki andil yang besar

dalam wujud partisipasi dan kontribusi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya yang mumpuni ini mendai faktor pendukung keberhasilan pembangunan embung di Desa Manggihan. Tidak hanya berperan dalam proses perencanaan, Kelompok Tani Utomo juga sangat bertanggung jawab dan mengetahui apa yang akan mereka lakukan.



Gambar 2. Sosialisasi Pembangunan Embung

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 3. Monitor Evaluasi Rutin Lapangan dalam Proses Pembangunan Embung

Sumber : Dokumen Pribadi (2024)

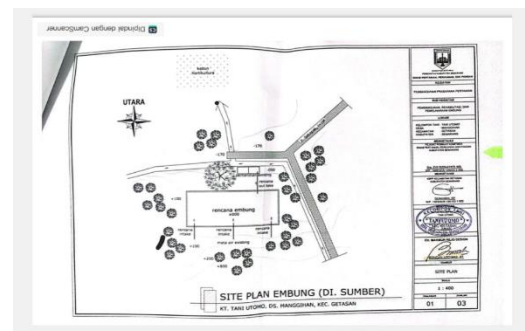
Dokumentasi di atas merupakan salah satu perwujudan elemen komunikasi yaitu sosialisasi dan evaluasi dalam

perencanaan hingga pembangunan embung Desa Manggihan. Sosialisasi dilakukan satu tahun sebelum proses pembangunan pada tahun 2020 dan monitor evaluasi juga dilakukan pada tahun 2021 selama proses pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan. Sosialisasi yang terlaksana membahas beberapa hal, diantaranya rencana pembangunan, Lokasi pembangunan embung, status tanah untuk embung, luasan lahan yang terdampak pembangunan, ukuran embung, volume ketersediaan air, dan Rancangan Anggaran Belanja. Pihak-pihak yang terlibat selama proses sosialisasi ini adalah seluruh anggota Kelompok Tani Utomo, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan, dan Pendamping Teknis. Sosialisasi kepada masyarakat tersebut juga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam implementasi kebijakan. Kegiatan ini juga berorientasi pada kebutuhan dan tututan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar menjadi kegiatan rembug yang bersifat formalitas belaka. Hal ini disebabkan kegiatan Musrenbag di tingkat desa tersebut telah sepenuhnya menghasilkan kebijakan yang mereka harapkan.



Gambar 4. . Laporan Pemilihan Lahan Pembangunan dari Organisasi Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)



Gambar 5. Site Plan Hasil Diskusi DPPP dengan Organisasi Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

#### b. Sumber Daya

Terdapat dua kategori utama dalam sumber daya yaitu manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia sebagai target sekaligus implementor sebagai pelaksana kegiatan harus bersikap kompeten. Berkaitan dengan hal ini, penelitian menunjukkan adanya kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses



pembangunan, salah satunya adalah karang taruna yang andil dalam proses pembangunan serta tokoh masyarakat lain yang ikut berkontribusi untuk memberikan saran dan masukan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memaksimalkan manfaat sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, manusia adalah sumber daya yang paling krusial dalam menentukan titik kesuksesan implementasi kebijakan. Berkaitan dengan hal ini Kelompok Tani Utomo memiliki peran besar dalam proses pembangunan embung. Kelompok ini berperan dalam pembuatan dan pengajuan proposal kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Kelompok Tani Utomo ini juga berperan untuk membuat rancangan anggaran yang akan diajukan kepada pemerintah. Hal ini akan menjadi sumber informasi kepada pemerintah mengenai tuntutan kebutuhan dana dari pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pengajuan tersebut. Adanya rincian ini juga dapat menjadi tolak ukur kebutuhan dan mengantisipasi minimnya fasilitas yang akan disalurkan.

Dana Alokasi khusus yang tersedia sebesar Rp114.000.000,00

untuk total seluruh kebutuhan selama proses pembangunan. Penganggaran ini terdiri dari pekerjaan persiapan yang dibuat dengan anggaran Rp250.000,00 dan pekerjaan tanah Rp15.825.000,00. Terdapat pula sub pekerjaan pasangan dengan total Rp96.727.500,00. dan total pekerjaan inlet dan outlet sebesar Rp1.238.381,00. Sedangkan terdapat anggaran dana desa yang digunakan dalam pemeliharaan seperti penyediaan fasilitas pagar dengan total anggaran Rp74.862.500,00. Sumber daya manusia di Desa Manggihan bersifat partisipatif dengan telah melakukan kontribusi secara komprehensif selama awal hingga akhir pembangunan Embung Manggihan. Salah satu hambatan yang terdapat selama proses pembangunan embung adalah kebocoran sisi embung yang disebabkan oleh material yang kurang mendukung.

### c. Disposisi

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 proses pelaksanaan pembangunan embung telah berhasil direalisasikan. Selama bulan Oktober sampai November tahun 2021 atau pasca pembangunan embung, jumlah pemenuhan kebutuhan air masyarakat sangat memadai karena air

dapat didistribusikan ke seluruh desa dengan pompa meteran.

Sikap dari pelaksana kegiatan adalah faktor penting kebijakan yang efektif. Terdapat hal-hal penting yang harus dipahami pada variable, yaitu:

- a. Efek dispoisi; disposisi ini berpotensi untuk memberikan hambatan-hambatan yang nyata apabila pihak yang terlibat tidak melaksanakan kegiatan yang diperintahkan ole pejabat tinggi. Maka dari itu, pemilihan personal dalam pembangunan embung di Desa Manggihan haruslah orang yang memiliki dedikasi besar terhadap kebijakan tersebut. Dalam proses pembangunan embung ini, masyarakat yang terlibat adalah masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pembangunan infrastruktur. Di luar dari itu, biasanya mereka hanya membantu untuk pekerjaan ringan dan menjadi pengawas.
- b. Melakukan pengaturan birokrasi; pengaturan birokrasi ini dimaksudkan agar implementor yang terlibat haruslah memiliki kapabilitas, kemampuan dan komptensinya agar pelaksanaan dapat maksimal. Pengaturan

birokrasi ini juga bermuara pada sistem yang membentuk pelayanan publik yang baik, penilaian personal, dan *bypassing personal*.

- c. Insentif; bahwasanya salah satu cara untuk mengatasi permasalahan SDM adalah dengan manipulasi insentif. Hal ini dikarenakan pada dasarnya individu bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Di samping itu, mereka juga akan dapat memenuhi *self interest* atau organisasi. Dalam pelaksanaan pembuatan embung Desa Manggihan, insentif yang diberikan pemerintah telah mencukupi. Begitu pula dana desa yang digunakan terdapat sisa anggaran SILPA. Meskipun insentif memakan proses yang lama untuk dapat disalurkan. Namun, seluruh anggaran yang diterima telah mampu mencukupi kebutuhan pembangunan embung.

Pembangunan ini berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 81 Tahun 2013. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan embung diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan air dan daya air serta untuk pengendalian daya rusak air.

Dalam Implementasi kebijakan ini terdapat beberapa kriteria pembangunan embung yang telah berhasil direalisasikan menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 81 Tahun 2013, yaitu :

- a. Syarat ketinggian embung maksimal setinggi 10 meter. Dalam hal ini embung yang dibangun di Desa Manggihan setinggi 3 meter.
- b. Daya tampung embung maksimal 500.000 meter kubik. Berkaitan dengan hal ini embung yang dibangun di Desa Manggihan memiliki daya tampung 535 meter kubik.
- c. Debit banjir di Desa Manggihan berada di bawah maksimal perhitungkan, yaitu maksimal 1.000 (seribu) meter kubik per detik.

Respon masyarakat Desa Manggihan, terkhusus Dusun Sengon sebagai penyedia lahan untuk pembangunan terbagai menjadi dua kategori, yaitu pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat memberikan respon yang baik. Namun terdapat sebagian kecil masyarakat yang menolak pembangunan ini. Salah satunya ketakutan masyarakat atas

penyalahgunaan air. Terdapat alasan lain sebagai wujud penolakan kebijakan yaitu terkait masalah lahan. Warga yang sudah berusia senja sangat kental dengan budaya mitosnya, sehingga mereka beranggapan bahwa daerah tersebut sangat terjaga dan tidak boleh dirubah. Meskipun demikian, sebagian besar dari masyarakat yang mendukung kebijakan ini sangat mengharakan tercapainya proses pembangunan.

#### d. Struktur Birokrasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa telah ada koordinasi secara riil dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Namun, pada pemeliharannya setelah pembangunan embung, pada tahun 2021 belum ada fasilitas secara maksimal terkait kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi atau aturan ini tidak memiliki sanksi pidana, hukum, ataupun sanksi administrasi. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam pelaksanaan pembangunan hanya berpedoman pada sanksi yang telah disepakati dalam diskusi atau rapat kerja dengan pihak-pihak yang terkait. Selama proses pelaksanaan kegiatan, azas kebersamaan dan tanggung jawab

menjadi prioritas penting untuk mengawasi jalannya regulasi ini. Pengawasan dan evaluasi selama proses pembangunan berjalan dengan lancar sehingga tidak ditemukan pekerjaan yang mangkrak ataupun pekerja mapupun birokrat yang tidak kompeten. Kerja sama yang maksimal dalam proses implementasi peraturan gubernur ini menjadi bukti nyata tata kelola pemerintahan yang baik *atau good governance*. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Semarang dari awal pemabngunan, yaitu tahun 2021 mampu memberikan sarana dan prasaranan berupa alat berat seperti ekskavator dan mampu menyelesaikan sengketa lahan pembangunan. Terdapat laporan kegiatan setiap termin anggaran. Setelah termin terakhir, yaitu termin penyelesaian, barulah dana akan cair. Dikarenakan dana dari pemerintah baru dapat dialokasikan setelah termin terakhir yang tidak memungkinkan pekerja untuk menunda pembangunan sampai dana cair, akhirnya masyarakat meminta bantuan pinjaman kepada pihak ketiga. Kemudian, setelah dana dari pemerintah cair dana pinjaman akan dikembalikan ke pihak ketiga

## **FAKTOR PENGHAMBAT**

Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang menjadi problematika tersendiri dalam proses pembangunan. Berbagai hambatan yang ada, antara lain :

- a) Ketidak jelasan Mengenai Standar Operating Procedures.

Terdapat hambatan mengenai keputusan SOP atau Standards Operating Procedures, yaitu kesepakatan yang tidak dimiliki secara tertulis oleh pihak masyarakat. Sampai saat peneliti melakukan wawancara, masyarakat mengaku tidak memiliki SOP tertulis. SOP ini hanya dimiliki oleh pihak pemerintah. Hal ini dapat menjadi misskomunikasi atau kesalahpahaman dalam tata aturan. Tentunya SOP tertulis yang dimiliki oleh masyarakat ini merupakan suatu hal yang krusial untuk menunjukkan keterbukaan komunikasi atas aturan yang ada.

- b) Keterlambatan Proses Alokasi Dana

Alokasi dana yang memerlukan proses yang lama untuk pencairan dana oleh pemerintah pusat. Hambatan ini berpotensi untuk

memberikan dampak buruk seperti proses pembangunan yang tertunda dan kegagalan dalam pembangunan embung. Modal dalam pelaksanaan kegiatan merupakan faktor utama dalam pembangunan. Bahkan keterbatasan dana merupakan problematika yang besar, apalagi dengan proses pencairan dana yang memerlukan waktu yang lama. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sikap pemerintah untuk dapat cepat dan tanggap dalam alokasi anggaran. Untungnya masyarakat telah menemukan solusi untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan bantuan perangkat desa. Kemudian setelah dana dari pemerintah cair, pinjaman tersebut dapat dikembalikan. Sebenarnya anggaran baru dialokasikan saat pembangunan hampir selesai atau setelah mencapai termin ke-tiga. Hal ini tentunya menimbulkan potensi-potensi atau kemungkinan negatif yang merugikan masyarakat. Salah satunya apabila ternyata dana alokasi yang ada, memerlukan waktu jauh lebih

lama, tentunya beban pinjaman akan semakin besar.

## **FAKTOR PENDUKUNG**

### **a. Komunikasi yang Bersifat Bottom Up**

Komunikasi yang telah melibatkan masyarakat sejak awal pembangunan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pembangunan menjadi faktor pendukung utama yang paling penting. Berdasarkan hasil wawancara, penelitian ini menunjukkan adanya sosialisasi dan stimulan bantuan yang dilakukan secara bertahap dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Desa Manggihan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui kelompok tani Budi Utomo. Terdapat pembinaan sebelum dilakukan proses pembangunan serta diskusi konsultan untuk menentukan lahan dan desain yang disosialisasikan kepada pihak-pihak yang akan berkontribusi dalam proses pembangunan. Terdapat kegiatan diskusi yang dilakukan setiap minggu dan kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap sekian persen

pembangunan embung yang dibagi dalam tiga tahap yaitu 25%, 75%, dan 100% sekaligus evaluasi kegiatan.

- b. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengawasan yang dilakukan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP), Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Ketua Kelompok Tani. Pengawasan ini dilakukan setiap hari selama proses pembangunan Embung Manggihan. Sumber daya finansial sebagai aspek penunjang keberhasilan aturan pembangunan embung dilakukan secara terbuka dan dilakukan oleh kelompok tani Budi Utomo.
- c. **Transparansi Dalam Proses Implementasi**  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan kegiatan telah terealisasi dengan baik. Hal ini terbukti dari pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, penentuan lokasi oleh masyarakat Desa Manggihan, serta laporan realisasi anggaran oleh Kelompok Tani Utomo.

## **KESIMPULAN**

Implementasi tentang kebijakan pembangunan embung yang berlandaskan pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 81 Tahun 2013 tentang pembangunan embung di Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi problematika infrastruktur air yang kurang memadai. Keberhasilan kebijakan pembangunan embung tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan keberhasilan ke-empat indikator yang digunakan penulis untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ini, yaitu komunikasi dengan adanya sosialisasi dan evaluasi, sumber daya yang memadai, baik SDM maupun anggaran. Disposisi yaitu tanggung jawab implementor serta struktur birokrasi yang mengandalkan *bypassing personal*.

## **SARAN**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah, terkhusus Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan dapat lebih tanggap untuk melakukan dukungan terhadap upaya pemeliharaan embung seperti penyediaan fasilitas pagar dan

- atap untuk menghindari kecelakaan kerja dan kebersihan air embung.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan harus memberikan Standar Operasional Prosedur yang jelas sebagai bentuk tanggung jawab dan aturan yang sesuai.
  3. Pemerintah sebagai implementor seharusnya lebih tanggap dan cepat dalam alokasi dana untuk proses implementasi kebijakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana.
  4. Masyarakat seharusnya bersikap lebih tegas mengenai kejelasan Standar Operasional Prosedur yang dijalankan agar terdapat aturan tertulis yang menjamin pelaksanaan kegiatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Nisa Nurmauliddiana, dan Kharisma Nasionalita. 2018. Pengaruh Sosialisasi Terhadap

Pengetahuan Pelajar Mengenai Hoax (Studi Pada Program Diseminasi Informasi Melalui Media Jukrak Di SMKN 1 Pangandaran). Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 6, No. 1. Hal. 124.

Admindpu. 2020 Embung: Manfaat dan Pembangunannya. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/870/embung-manfaat-dan-pembangunannya>.

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.

Aini, Nur. 2020 *2,3 Juta Warga Jawa Tengah Terancam Dampak Kekeringan*, Republika :Jawa Tengah. <https://news.republika.co.id/berita/qgbh60382/23-juta-warga-jawa-tengah-terancam-dampak-kekeringan>.

Anwar dan Chairulliza Fanani, Rizky 2020. Analisis Ketersediaan Air Embung Sebagai Sumber Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi Pekon Podosari Kabupaten Pringsewu. Skripsi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Fakultas Teknik

BMKG.go.id. 2021. Waspada Potensi Curah Hujan Tinggi dan Kekeringan Meteorologis di Indonesia 10 Hari Ke Depan. <https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=bmkg->

- waspada-potensi-curah-hujan-tinggi-dan-kekeringan-meteorologis-di-indonesia-10-hari-ke-depan&tag=press-release&lang=ID.
- Citra Muslima, Annisa. 2018. Pembangunan Embung di Kabupaten Rembang dan Pagaruhnya Terhadap Produktivitas Pertanian Tahun 1989-1999. Skripsi Fakultas Ilmu Budaya.
- Deepublish. 2022. Validasi Data Penelitian: Pengertian, Metode, dan Contoh Lengkap. <https://penerbitdeepublish.com/validasi-data-penelitian/>.
- Dwiningrum, S.I.A. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emerald, Gabriel. 2023. Pengembangan Embung Bansari di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tesis Univeritas Atma Jaya Yogyakarta.
- Febriani, Reza. 2013. Analisis Implementasi Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekan Baru (Studi Kasus Penertiban, pembinaan Gelandangan dan Pengemis). Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Gayuh A.A., Syahrul dan Mayasari, Intan. Analisis Pemanfaata Embung Desa Karangsambilagah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Jurnal Dearsip, Vol. 1, No. 2.
- Hastuti, Sri. 2022. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Tesis: Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- Srn. Menlhk.go.id. 2019. Proklamasi Desa Manggihan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. <https://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Faksi&id=8956>.
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta : Mandar Maju.
- Jannah, Wafirotul. 2020. Embung dan Pemberdayaan Masyarakat, Studi Proses, Model, dan Dampak Pemberdayaan Masyarakat di Dusun Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta.



- Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lestari, Desi. 2021. Implementasi Kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI)Eklusif di Dinas Kesehatan. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Rniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Medcom. Id. 2023. Kekeringan di Jateng Meluas ke 21 Kabupaten/Kota. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/GNIMIDmb-kekeringan-di-jateng-meluas-ke-21-kabupaten-kota#:~:text=Berdasarkan%20data%20wilayah%2C%20kekeringan%20di%20Jawa%20Tengah%20melanda,kebutuhan%20air%20bersih%20terus%20dilakukan%20penggelontoran%20ke%20desa-desas>.
- Noer Uyunina, Ulvia, 2018. Studi Tentang Program Pembangunan Seribu Embung di Kabupaten Bojonegoro Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan Skripsi Universitas Brawijaya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,.
- Nur Aini. 2020. 2,3 Juta Warga Jawa Tengah Terancam Dampak Kekeringan. <https://news.republika.co.id/berita/qgbh60382/23-juta-warga-jawa-tengah-terancam-dampak-kekeringan>.
- Nurhadi, Zikri Fachrul. 2017. Teori Komunikasi Kontemporer. Depok: Kencana.
- Nurpratiwi, Ratih, dkk. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu POLitik, Vol. 4, No. 2.
- Palupi, Galih Ayu. 2022. Macam-Macam Teori Motivasi Menurut Ahli. [https://tirto.id/macam-macam-teori-motivasi-menurut-ahli-maslow-hingga-herzberg-gtnd#google\\_vignette](https://tirto.id/macam-macam-teori-motivasi-menurut-ahli-maslow-hingga-herzberg-gtnd#google_vignette).
- Prasojo, Rizky Akbar. 2015. Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo). Skripsi Ilmu Administrasi Negara.
- Putro, Kartiko Bramantyo D., dkk. 2018. Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Jurnal Of Public Policy and Management Review Vol. 7, No. 3.
- Rahmananto, Henry, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo Kabupaten Kulon Progo. Jurnal

- Ilmiah Pustaka Vol., 10, No. 1.
- Sarasidya Habsar.2020. Pemanfaatan Tampungan Embung Ngangkrik Untuk Suplesi Air Irigasi di Dusun Ngangkrik Desa Triharjo Sleman.Skripsi Fakultas Teknik.
- Setkab.go.id.2022. *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022.* <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>.
- Soloposjateng. 2023. 11 Kecamatan di Kabupaten Semarang Ini Rawan Kekeringan saat Musim Kemarau. <https://jateng.solopos.com/11-kecamatan-di-kabupaten-semarang-ini-rawan-kekeringan-saat-musim-kemarau-1648702>.
- Susanto, Dwiyono Rudi, dkk. 2022. Potensi dan Daya Tarik Wisata Embung Kledung di Temanggung Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6, No. 2.
- Turner, D.P. 2020. Sampling Methods in Research Design. *Headache : The Journal of Head and Face Pain*.
- Wadu, Yakub, dkk. 2023. Analisis Tata Kelola Air Dalam Pembangunan Embung Untuk Keamanan Air Untuk Pertanian. *Jurnal internasional Vol, 2, No. 10.*
- Wijayanti, Novita, dkk. 2020. Embung Development Program Impact Evaluation in Banyumas District, Central Java. *Journal of ResearchGate, ICISPE 2020.*
- Peraturan Perundang-Undangan :*
- Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Waduk/Embung/Bendungan di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 2
- Peraturan Daerah Jawa Tengah no 4 Tahun 2013.
- Sumber Lain :
- Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan

